

## **KONSTRUKSI POLITIK, PRAETORIAN DAN PENDISCIPLINAN TUBUH**

**Fajar**

UIN Alauddin Makassar

Email: gerhana69matahari@gmail.com

### **Abstrak**

*Pergulatan mengenai keindonesian kita hari ini, tak lepas dari peran sejarah, mengapa gelombang krisis ekonomi Asia menimpa seluruh aspek perekonomian hingga kebangsaan di awali tahun 1997 dan klimaks pada 21 Mei 1998 yang kemudian menandai tumbanganya Orde Baru yang selama 32 tahun di kuasai oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan yang dianggap otoriter berganti dengan pemerintahan yang dianggap demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif menurut Creswell dalam Sugiyono diantaranya yaitu narrative research. Dimana peneliti mencoba menggambarkan kehidupan seorang tokoh atau individu dan menuliskan cerita dan riwayat pengalaman tokoh ataupun individu tersebut serta bagaimana riwayat konstruksi sosial politik di Era Soeharto kini seolah menjadi tatanan sosial baru sehingga digambarkan dalam bentuk narrative research. Penelitian ini menggunakan kerangka teori Daniel Dhakidae Cendekiawan dan Kekuasaan; Dalam Negara Orde Baru dalam melihat bagaimana pola kekuasaan dalam Orde Baru sebagai pisau konstruksi analisis yang berkembang. Hasil pada penelitian ini menggambarkan bagaimana sebuah pemerintahan Orde Baru menjalankan mesin Negara dengan memperhadapkan kekuatan militer, partai politik dan kekuatan birokrasi sehingga mendapatkan kekuasaan yang terjalin sedemikian lama sehingga mampu menciptakan pengawasan maupun panoptik terhadap warga Negara yang begitu teratur dan cenderung memaksa. Dalam politik tubuh, kekuasaan Soeharto yang mendisiplinkan lembaga-lembaga negara dan partai politik, agama sampai pada masyarakat Indonesia diterangkan oleh Michael Foucault sebagai panoptik atau pengawasan sehingga tercipta suatu masyarakat disiplin.*

### **Kata Kunci:**

*Orde Baru, Tubuh Politik, Panoptik Power*

### **Abstract**

*The struggle regarding our Indonesianness today, cannot be separated from the role of history, why the Asian economic crisis hit all aspects of the economy to nationalism in early 1997 and the climax on May 21, 1998, which then collapsed the New Order which was ruled by President Suharto for 32 years. The government that is considered authoritarian is replaced by a government that is considered democratic. The method used in this study is a qualitative method according to Creswell in Sugiyono including narrative research. Where the researcher tries to describe the life of a character or individual and writes a story and history of the experience of the character or individual as well as how the history of socio-political construction in the Soeharto Era now seems to be a new social order so that it is described in the form of narrative*

*research. This study uses the theoretical framework of Daniel Dhakidae Scholar and Power; In the New Order State to see how the pattern of power in the New Order was as a developing analytical construction. The results of this study describe how a New Order government ran the state machine by confronting military, political, and power forces so as to create power and power over citizens in such a way and coercive. In body politics, Suharto's power to discipline state institutions and political parties, religion to the Indonesian people is explained by Michael Foucault as panoptic or so as to create community discipline.*

**Keywords:**

*New Order, Political Body, Panoptic Power*

**Pendahuluan: Konstruksi Politik dan Praetorianisme Orde Baru**

Pergulatan mengenai keindonesian kita hari ini, tak lepas dari peran sejarah, mengapa gelombang krisis ekonomi Asia menimpa seluruh aspek perekonomian hingga kebangsaan di awali tahun 1997 dan klimaks pada 21 Mei 1998 yang kemudian menandai tumbanganya Orde Baru yang selama 32 tahun di kuasai oleh Presiden Soeharto. Pemerintahan yang dianggap otoriter berganti dengan pemerintahan yang dianggap demokratis. Kejatuhan Presiden Soeharto melalui gerakan sosial adalah momentum gerakan perlawanan reformis yang ada di Indonesia sekaligus terbukanya keran perubahan reformasi selebar-lebarnya dan peluang dan harapan dari tawaran sistem pemerintahan yang baru. Berbagai konstruksi sosial politik di Era Soeharto kini seolah menjadi tatanan sosial baru bahkan menjadi “hantu” yang baru yang masih terjadi dan bahkan berulang pada aktifitas sosial politik yang disebut sebagai jaman millennial, dalam era teknologi saat ini, kemampuan mengakses berita dan informasi sudah terasa sangat cepat, perusahaan mayor informasi tidak lagi berkuasa atas jaminan informasi tunggal namun masyarakat saat ini sudah mampu mencipkatan informasi dan berita melalui nalar berita mereka buat sendiri dalam situs online maupun blogger pribadi masing masing. Konstruksi sosial politik tersebut juga dimamfaatkan oleh mereka para pendukung narasi atau konstruksi sosial politik Soeharto, misalnya kata SARS yang berarti “Saya Amat Rindu Soeharto”, “Piye Kabare, Enak Jamanku To” atau yang paling menimbulkan pro kontra berlebihan adalah “Pak Harto Diangkat Menjadi Pahlawan Nasional”. Konstruksi sosial politik tersebut telah menjadi perdebatan sampai sekarang.

Di Era Soeharto, konstruksi sosial Soeharto dibangun pada berbagai macam komponen bangsa yang melegitimasi kekuasaannya sebagai pemimpin besar Indonesia. Kita mengenal kata-kata seperti “demi pembangunan”, “Melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen”, “menurut Bapak Presiden”, “Dwi Fungsi ABRI”, “Golkar”, “Korpri”, “Supersemar”, “G 30 S PKI”, “Serangan Fajar”, “KNPI”, “Dharma Wanita”, “Diamankan”, “Serasi Selaras Seimbang”, “P4”, “Bersih Diri”, “GBHN”, terakhir adalah “Bapak Pembangunan”, merupakan bentuk-bentuk konstruksi sosial yang berhasil mengukuhkan Soeharto hingga 32 tahun memimpin Indonesia.<sup>1</sup>

Ketika Soeharto membacakan teks pidato keputusan untuk lengser sebagai presiden, pukul 9 pagi 21 Mei 1998, banyak orang yang menyaksikannya lewat layar kaca terkejut dengan keputusan itu. Tentu, mayoritas rakyat Indonesia bergembira atas lengsernya sang presiden yang pernah menorehkan prestasi, tetapi pada akhirnya prestasi itu tersapu oleh ketamakan dan kekacauan ekonomi dan politik. Sebagaimana dicatat oleh Geoff Forrester dalam Jakarta Diary-nya “Mestinya peristiwanya bisa berjalan lain” (Forrester, 1998, hlm, 45). Soeharto baru saja dipilih sebagai presiden secara bulat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dua bulan sebelumnya, kendati para elit pendukungnya dan demonstran jalanan banyak menyuarakan ketidaksetujuan. Namun, hanya sedikit pengamat politik Indonesia yang meramalkan bahwa akhir kekuasaan Soeharto akan datang begitu cepat.<sup>2</sup>

Pidato kemunduran Soeharto sebagai presiden Indonesia saat itu adalah merupakan pidato sambutan kemunduran yang menurut hemat penulis formal dan “berwibawa” lantaran disiarkan di televisi nasional dengan menggunakan pakaian jas lengkap dan jajaran kabinet di dalam Istana Kepresidenan, berbeda dengan Presiden dictator lainnya seperti Presiden Irak Saddam Hosein yang berakhir ditiang gantung dimana sebelumnya ditangkap oleh pasukan Amerika Serikat saat bersembunyi di sebuah persembunyian kotor pada tahun 2006, Presiden Libya Moammar Khadafi setelah berkuasa selama 42 tahun antara tahun 1969-2011 yang berawal dari revolusi arab spring yang dimulai pada awal 2011, Muammar Khadafi tewas di tangan pasukan oposisi yang sebelumnya dinyatakan buron dan menghadapi tuntutan dari pidana

---

<sup>1</sup>Burhan Bungin, *Komunikasi Politik Pencitraan The Social Construction of Public Administration (SCoPA)*, (Jakarta; PrenadaMedia Grup 2018), h.144.

<sup>2</sup>Simon Philpott, *Meruntuhkan Indonesia; Politik Postkolonial dan Otoritarianisme* (Yogyakarta; LKIS, 2003), h. 1.

internasional dengan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Pidato kemunduran presiden Soeharto yang sesungguhnya berbeda nasib dengan pemimpin diktator lainnya seperti Saddam Husein yang berakhir di pasukan Amerika Serikat dan hukum gantung berikut Muammar Khadafi yang gelombang oposisi yang kental dari pihak bersenjata yaitu Tentara Nasional Libya.

Memeriksa Orde Baru sama sekali tidak mungkin tanpa memeriksa agama-agama, dan siapa pun yang memeriksa agama-agama di Indonesia hampir tidak mungkin tanpa memeriksa Orde Baru. Orde Baru memeralat agama, agama memeralat Orde Baru, Agama berlindung pada Orde Baru, Orde Baru berlindung pada agama. Di tengah itu semuanya para cendekiawan bekerja dari dalam.<sup>3</sup>

Kekuasaan Orde Baru dijalankan tidak sekonsisten seperti yang selalu dibayangkan. Orde Baru tidak saja mengatur dan mengontrol lembaga lembaga politik resmi seperti partai, lembaga-lembaga negara lainnya namun masuk edalam unit-unit penting dan halus seperti agama. Sebagaimana dalam politik partai, *party politics*, demikian pula dalam politik agama, *religion politics*, dikerjakan. Control terutama adalah semua digiring untuk beragama, kalau sudah beragama maka agama hanya dibolehkan lima, sebagaimana juga hanya boleh tiga partai dalam politik. Namun, kekuasaan yang dimainkan terpecah-pecah. Pola pertama adalah modal. Modal bermain di dalam agama, control modal Orde Baru di dalam agama. Kontrol lain berlangsung pula terhadap *tubuh* manusia.<sup>4</sup>

Dalam politik tubuh, kekuasaan Soeharto yang mendisiplinkan lembaga-lembaga negara dan partai politik, agama sampai pada masyarakat Indonesia diterangkan oleh Michael Foucault sebagai panoptik atau pengawasan sehingga tercipta suatu masyarakat disiplinier, teknik yang digunakan diseluruh instansi dan lembaga negara seperti di sekolah, di rumah sakit, di penjara, partai politik, kementerian, aparat desa sampai institusi terkecil seperti keluarga.

Jadi, kekuasaan yang sempurna memperlihatkan bahwa aktualitas pelaksanaannya semakin tidak diperlukan lagi, tetapi efeknya dirasakan. Dan objek kekuasaan itu sendiri justru menjadi pembawa potensial situasi dominasi, yang

---

<sup>3</sup>Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan; Dalam Negara Orde Baru* (Jakarta; PT. Gramedia Pustaa Utama. 2003), h. 734.

<sup>4</sup>*Ibid.*

memungkinkan pelaksanaan kekuasaan. Misalnya, para pedagang lebih merasa aman membayar tuntutan preman daripada lapor polisi. Foucault mengatakan bahwa sistem panoptik merupakan sistem ketika hubungan kekuasaan menjadi total dan tidak bersifat fisiko. Kehadiran fisik atau pengawasan cukup sesekali saja. Sistem itu merupakan model berfungsinya penegakan disiplin yang dapat diterapkan di segala bidang.

Sebagai suatu bentuk obsesi rasionalisasi, panoptik berfungsi seperti orthopedi sosial. Panoptik merupakan bentuk pengawasan yang tidak membutuhkan lagi kekerasan fisik yang bisa membekas pada tubuh. Ia merupakan sistem tersembunyi sebagai kekuasaan yang berjalan, tetapi tidak bisa dimiliki, suatu fungsi yang dirasakan umum, tetapi tidak bisa dikenali, kecuali dari akibat-akibatnya, dari pengawasan yang dirasakan, dari pemeriksaan yang dijalankan, dari penegakan disiplin. Ada tiga tujuan pembentukan masyarakat disipliner melalui sistem panoptik ini: *pertama*, membuat pelaksanaan kekuasaan lebih murah dari segi ekonomi, *kedua*, dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan, dan *ketiga*, memaksimalkan manfaat sarana pedagogi, militer, industri, sehingga meningkatkan kepatuhari dan kegunaan seluruh unsur sistem. Disiplin melalui panoptik menjadi teknik efektif untuk menjangkau kehidupan paling intim tanpa bisa diketahui datang dari subjek tertentu.<sup>5</sup>

Gejala panoptik power ini dalam kaitan dengan pemerintahan Soeharto, telah dirasakan oleh masyarakat Indonesia sampai pada kelompok institusi terkecil misalnya di keluarga ataukah pada institusi perdesaan, dimana panoptik power ini perpanjangan tangannya adalah militer yang ditugaskan sampai pada wilayah pemerintahan pusat sampai di desa. Kekuatan militer jaman Soeharto dianggap sebagai kekuatan yang mampu memata-matai gerak dan aktivitas masyarakat.

Keterlibatan militer dalam politik kekuasaan hanya dipandang oleh sebagian ahli militer sebagai penyimpangan atau dikenal sebagai *politik decay*, karena militer hanya berfungsi sebagai kekuatan pertahanan dan atau keamanan. Apabila militer memasuki wilayah politik, maka itu memasuki wilayah sipil, karena itu dipandang sebagai intervensi. Pandangan yang berbeda mengenai keterlibatan militer dalam politik Indonesia juga muncul dari beberapa pengamat politik, keterlibatan militer dalam politik di dunia ketiga dapat dipahami, karena kondisi sosio politik masyarakat yang

---

<sup>5</sup>Haryatmoko, "Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan; Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucault" dalam *Jurnal Basis*, Nomor 01-02, Tahun ke 51 (2002), h. 14-15.

memerlukan militer dalam percaturan politik kekuasaan.<sup>6</sup> Atas dasar pemikiran tersebut bahwa keterlibatan militer sebagai kekuatan panoptik didalam lingkungan masyarakat menjadi sebuah kekuatan yang mengawasi dan mendisiplinkan tubuh dalam wilayah kerakyatan yang seterusnya menjadi ajang mempertahankan kekuasaan Soeharto di masa itu mendominasi percaturan politik nasional yang dilakukan secara terstruktur dan massif. Kekuasaan militer juga mengarah pada kekuasaan yang sangat birokratis misalnya sampai pada jabatan penting di pusat sampai di daerah seperti misalnya kekuasaan kementerian, sampai menduduki posisi penting dalam jabatan politik misalnya Gubernur, Walikota sampai dengan Bupati, tak hanya pada jalur Orde Baru, bahkan pasca Orde Baru pun kekuatan politik militer masih berlaku sampai sekarang dalam kancah pertautan politik nasional maupun lokal, hingga yang menjadi fenomena hingga sekarang, banyak dari mereka yang telah menjadi pensiunan militer kembali aktif menjadi dan mencalonkan diri menjadi kepala desa yang hingga kini jabatan kepala desa cukup berpengaruh terhadap model politik pasca Orde Baru dan demokrasi sekarang sesaat setelah undang-undang desa telah diperbaharui dan desa mempunyai hak untuk mengelola anggaran yang terhitung lumayan besar untuk dikelola.

Krisis ekonomi dan politik yang dimulai pertengahan 1977 dan puncaknya ketika gerakan massa yang menghendaki agar Soeharto segera turun dari jabatannya menjadi sangat penting dalam memahami posisi militer ketika menangani gerakan massa yang dimotori mahasiswa yang menuntut perubahan serta tuntutan yang menyertai gerakan tersebut. Gelombang protes yang berlangsung sejak akhir 1997 dan terus berulang hingga jatuhnya Soeharto pada Mei 1998 menjadi tantangan bagi militer, tidak hanya manajemen krisis militer, tetapi juga tindakan-tindakan yang selama Orde Baru berkuasa sering bertindak keras menghadapi segala macam aksi protes. Benturan antara militer dan massa yang terjadi pada 1998, banyak aktivis yang hilang pada periode tersebut, sebagian mereka dianggap diculik oleh militer, meski tuduhan ini belum begitu jelas, yang jelas banyak keluarga yang mengaku kehilangan putra-putra mereka, juga terbunuhnya empat orang mahasiswa Trisakti Jakarta akibat penembakan yang dilakukan militer pada peristiwa semanggi I. Kerusuhan massa juga terjadi di Jakarta pada bulan Mei sebagai implikasi dari berbagai aksi protes massa yang semakin

---

<sup>6</sup>Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan* (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Politik UIN ALauddin Makassar, 2015), h.14-15.

meluas yang kemudian melahirkan aksi penjarahan dan bahkan pemerkosaan terhadap perempuan keturunan.<sup>7</sup>

Kekuatan politik Soeharto sejak Orde Baru adalah gambaran kekuatan militer. Gambaran kekuatan seorang Soeharto yang digelar sebagai *The Smiling General* di dunia Barat, gambaran kekuatan sebuah golongan yang berkuasa selama 32 tahun lamanya yakni kekuasaan Golongan Karya yang dikenal dengan sebutan Golkar, yang didirikan oleh golongan militer perwira angkatan darat merajai garis kepemimpinan pusat sampai daerah di zamannya dimana setiap pemilu saat Orde Baru menguasai suara pemilu diatas 60%, selalu nomer satu sejak pemilihan umum tahun 1971-1997 di jaman Presiden Soeharto. Militer dan Golkar adalah dua kekuatan yang saling menopang disaat Orde Baru, bahkan sejak pemilihan umum tahun 1971 sampai pemilihan umum tahun 1997. Kekuatan Militer dan Golkar termasuk melakukan infiltrasi atau rekayasa ketentuan yang menguntungkan mereka seperti kewajiban Pegawai Negeri Sipil memilih Golkar pada setiap pemilihan umum. Dalam pada tahun itu, kekuatan Golkar dan militer secara langsung maupun tidak langsung mampu mengontrol eksekutif maupun legislatif, tak terkecuali yudikatif saat itu, pengawasan maupun kontrol lembaga negara yang sangat sistemik.

Mengingat posisi dan pengaruh militer disejumlah negara sebelum penghujung abad ke-20 cukup besar, Erick Nordlinger (1977) yang menaruh minat kuat pada studi-studi militer memberi sebutan “tentara-tentara *praetorian*” bagi militer yang terlibat didalam politik. Nordlinger menggambarkan *praetorianisme* sebagai “situasi di mana anggota militer merupakan aktor politik utama karena menggunakan kekuatan nyata atau ancaman yang mereka miliki” (Nordlinger,1977:2). Sebutan tentang “tentara-tentara *praetorian*” ini didasarkan atas apa yang pernah terjadi di masa Romawi Kuno. Pada masa kekaisaran Romawi Kuno itu, kaisar membentuk suatu unit militer khusus untuk melindungi dirinya. Unit khusus itu disebut “*prajurit praetorian*”. Tetapi, upaya kaisar ini ternyata justru memakan dirinya sendiri. Yang terjadi kemudian, para *prajurit praetorian* menggulingkan para kaisar dan mengontrol proses pergantian para kaisar

---

<sup>7</sup>*Ibid*, h.357

berikutnya. Para prajurit itu pada kenyataannya memiliki kekuasaan yang tidak kalah dari kaisar yang mendirikanannya.<sup>8</sup>

Terlepas dari fakta bahwa militer di sejumlah negara telah melakukan intervensi politik, derajat keterlibatannya tidak sama antara negara yang satu dengan yang lainnya. Berangkat dari realitas seperti ini, Nordlinger kemudian membagi *tentara praetorian* itu ke dalam tiga kategori besar, sebagaimana terlihat pada table 12.1. Pertama adalah apa yang disebut sebagai “*moderators*”. Di dalam kategori ini militer tidak menjadi penguasa secara penuh, melainkan berbagi dengan yang lain. Hanya saja, militer tetap memiliki kekuasaan yang besar, yaitu memiliki hak veto dan berusaha melindungi *status quo* yang ada. Kedua adalah “*guardians*”, dimana militer cenderung ikut mengontrol pemerintah secara langsung. Maksudnya, agar militer bisa ikut secara langsung di dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan dan pemborosan-pemborosan yang pernah terjadi, baik sebelumnya maupun yang terjadi ketika militer itu sedang berkuasa. Terakhir adalah apa yang disebut sebagai “*rulers*”, dimana militer ikut mendominasi kekuasaan dan memiliki tujuan untuk melakukan perubahan-perubahan, baik politik maupun sosial ekonomi.<sup>9</sup>

Tabel 1.  
Tingkat Keterlibatan Militer dalam Politik

	<b>Moderators</b>	<b>Guardians</b>	<b>Rulers</b>
- Kekuasaan yang dimiliki - Tujuan ekonomi dan politik	Kekuasaan veto  Melindungi status quo	Kontrol pemerintahan  Melindungi status <i>quo dan</i> mengoreksi kesalahan-kesalahan serta pemborosan	Dominasi rezim  Memengaruhi perubahan politik dan terkadang perubahan sosial ekonomi

*Sumber: Nordlinger (1977:2)*

Upaya membuat tipologi seperti itu dilakukan oleh Nordlinger setelah membuat penilaian bahwa tipologi atau model mengenai relasi sipil-militer sebelumnya sudah

<sup>8</sup>Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia ; Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta; Prenada Media Grup, 2015), h. 244-246.

<sup>9</sup>*Ibid*

tidak tepat lagi untuk menggambarkan dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di negara-negara Amerika Latin, Asia dan Afrika. Sebagaimana diketahui, jauh hari sebelum Nordlinger dan sejumlah ilmuwan lain yang menaruh perhatian serius pada studi-studi tentang militer, paling tidak, telah ada tiga model mengenai relasi antara sipil dan militer. Pertama adalah model tradisional. Model ini diambil dari apa yang pernah terjadi pada abad ke-17 dan ke-18 dalam kerajaan-kerajaan monarki di Eropa. Para aristokrat di kerajaan-kerajaan monarki di Eropa membentuk kelompok sipil (birokrasi) dan militer pada saat yang bersamaan. Karena merupakan bentukannya, dua kelompok ini sama-sama dikendalikan oleh para aristokrat itu. Karena itu, dalam model ini terdapat adanya supremasi sipil atas militer. Tetapi, supremasi itu tidak seperti apa yang terjadi pada masa Eropa modern. Hal ini terjadi karena, tidak jarang, para aristocrat sendiri memainkan peran sebagai pimpinan kekuatan bersenjata. Pada masa Eropa modern, para aristocrat tidak mengambil bagian langsung sebagai pemimpin kekuatan bersenjata di medan perang.

Kedua adalah model liberal, yaitu adanya supremasi sipil atas militer yang lebih jelas lagi dari model yang pertama. Kejelasan demikian dimungkinkan karena ada perbedaan keahlian dan tanggung jawab antara sipil dengan militer. Kelompok sipil memegang kekuasaan atas pemerintahan, baik karena dipilih (*elected*) maupun ditunjuk (*appointed*). Di negara-negara demokratis, para politisi biasanya memegang jabatan karena dipilih, sementara birokrasi memegang karena tunjukkan. Mereka bertanggungjawab untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari. Sementara itu, kelompok militer memiliki kemampuan yang terlatih dan berpengalaman di dalam penggunaan kekuatan bersenjata. Kelompok ini memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara dari serangan negara-negara lain. Dengan demikian, militer dianggap tidak memiliki ruang pengaruh di dalam kehidupan politik. Apa yang dilakukan, baik dalam bentuk mempertahankan negara dari serangan negara lain atau ikut terlibat penyerangan negara lain, merupakan keputusan dari para politisi sipil.

Terakhir adalah model penetrasi, sebagaimana pernah terjadi di negara-negara komunis atau totaliter. Di dalam model ini militer memiliki pengaruh politik atas pemerintahan yang ada, misalnya, melalui penetrasi gagasan-gagasan politik. Proses ini

dilakukan mulai di bangku pendidikan militer sampai ketika mereka berkarier di dalam organisasi kemiliteran.<sup>10</sup>

Di masa Orde Baru sampai Reformasi, tentara *praetorian* ini merasuk menjadi politisi disetiap departemen pusat sampai daerah. Sistem politik Indonesia menjadikan militer sebagai sesuatu kekuatan politik tertentu yang patut diperhitungkan. Adapun pro dan kontra dalam pelibatan militer kedalam politik sudah sejak dari dulu, sejak Presiden Soekarno melarang TNI untuk berpolitik praktis.

Militer Indonesia merupakan militer yang lahir dari perpaduan profesionalisme dengan tradisi militer Jawa yang telah lama mengendalikan kekuasaan, juga perpaduan antara tradisi militer yang dilatih oleh Belanda (KNIL) dengan militer yang dilatih oleh Jepang (PETA). Begitu jatuhnya kekuasaan Bung Karno, politik Indonesia segera mengalami perubahan mendasar, tidak hanya pergantian aktor-aktornya, tetapi juga kekuatan-kekuatan politisi sipil mengalami kemunduran peran akibat kegagalan mereka menangani krisis sosial, inflasi dan politik yang berlangsung decade 1960-an. Pasca prahara 30 September 1965, militer mulai memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Selama Orde Baru, militer melakukan penetrasi yang sangat kuat dan sukses menguasai posisi-posisi politik strategis, pada 1982-1986, militer menguasai 64% jabatan pembantu dekat Presiden, 38% menteri, 67% inspektur jenderal, dan 20% direktur jenderal (Crouch, 1986:308-342).<sup>11</sup>

Prosentase ini menunjukkan betapa militer telah menjadi alat kekuasaan yang tidak penting, tetapi menentukan arah searah bangsa. Tidak hanya ditingkat pusat, di berbagai daerah pun militer mendominasi, posisi sebagai gubernur, bupati/walikota melebihi angka 50%, bahkan pada 1980-an jumlah militer yang menjadi gubernur mencapai 70% dan Bupati mencapai 56,6% (Thaba, 1997:193). Jaringan kekuasaan Orde Baru terdiri dari tiga jalur utama yaitu ABRI (Militer), Golkar dan birokrasi. Persentuhan militer dengan politik kekuasaan dapat digambarkan sebagai berikut (Crouch, 1986; Britton,1996; Muhaimin,2002) ;

1. Militer Indonesia tidak lahir atas prakarsa politisi sipil, militer pada mulanya adalah *instrument of national struggle* perjuangan rakyat yang diformalkan menjadi *instrument of force* pada 5 Oktober 1945;

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup>Syarifuddin Jurdi, *Op.Cit.* h. 342.

2. Sebagai implikasi dari kelahiran tersebut, keterlibatan militer dalam politik berlangsung sejak awal, fungsi sosio-politik militer bukanlah hasil pemikiran akademik tetapi produk pertumbuhan perjalanan sejarah bangsa dan revolusi;
3. Sebagai kekuatan politik, militer banyak dikecewakan oleh politisi sipil yang menurut militer merugikan perjuangan mempertahankan kemerdekaan;
4. Militer Indonesia beberapa kali memperoleh peluang politik untuk melakukan kudeta, tetapi tidak dimanfaatkan seperti kasus 17 Oktober 1952 yang merupakan manifestasi dari pembangkangan militer;
5. Peristiwa G 30 S/PKI 1965 telah menempatkan militer sebagai kekuatan utama dalam mengendalikan keamanan negara, sejak saat itulah peran militer secara kongkret dimatangkan;
6. Pasca Soeharto dilantik sebagai presiden RI pada 1968, penetrasi kekuatan militer ke dalam jaringan kekuasaan yang dilegitimasi dengan konsep dwifungsi ABRI, bahkan selama 1970-an dan 1980-an, peran politik militer semakin kuat dan menyebar, baik di pusat maupun di daerah;
7. Konsep dwifungsi ABRI ditafsirkan secara berlainan, bahkan ada yang menyamakan dengan dominasi militer, perbedaan penafsiran itu melahirkan dua sikap yakni mereka yang terus mempertahankan dominasi militer dalam politik dan mereka yang menghendaki agar secara perlahan dominasi itu segera diakhiri dan melibatkan politisi sipil secara dominan;
8. Pada akhir decade 1980-an, jumlah personil militer yang dikaryakan mengalami pengurangan, meski berkurang peran politiknya masih mendominasi;
9. Pertentangan antar generasi dalam tubuh militer pun tak terelakkan, mereka yang vocal menyuarakan agar demokrasi diterapkan dan menghendaki agar militer kembali kepada peran awalnya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan meningkat, khususnya dari generasi 1945;
10. Konsep dwifungsi didefinisikan oleh dua faksi yang kuat; a. menghendaki agar posisi strategis dalam pemerintahan diserahkan ke militer; b. konsep dwifungsi tidak berkaitan dengan strategi politik, tetapi menyangkut sikap mental, yang bukanlah kedudukan perwira militer dalam pemerintahan, tetapi sikap mental mereka. Yang pertama menghendaki dominasi militer dan yang kedua menentang dominasi militer dalam pemerintahan;

11. Keterlibatan militer dalam politik secara dominan terkadang dilegitimasi dari klaim bahwa merekalah yang paling berjasa terhadap negara, meski ini dituduh oleh para pengamat sebagai bentuk rekayasa sejarah militer. Klaim itulah yang kemudian melahirkan kenyataan bahwa antara institusi militer dengan pemerintah selama Orde Baru nyaris sulit dipisahkan, menurut Crouch perbedaannya sangat tipis.

Sebelum 1998, tahun kejatuhan pemerintahan Soeharto, posisi wakil presiden sejak Umar Wirahadikusuma, Soedharmono dan Tri Sutrisno adalah para jenderal yang telah menempati posisi penting dalam struktur komando militer. Pada 1998, menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR, dalam tubuh militer terjadi kompetisi antara kubu LB Moerdani dan ubu Soedharmono dalam perebutan kursi Wakil Presiden. Selain itu, militer juga mendominasi posisi penting dalam struktur kepengurusan Golkar.<sup>12</sup>

Dengan sangat mencolok Orde Baru tak pernah menyatakan secara publik bahwa pemerintahan ini adalah suatu rezim dalam keadaan darurat, bersifat sementara, atau bahkan bersifat untuk perlindungan. Orde Baru tak membuka peluang untuk kembali ke pemerintahan sipil atau pemulihan pemerintahan perwakilan. Dalam hal ini, rezim ini dapat digolongkan pada yang disebut oleh Nordinger dalam kategori “*ruler type praetorianisme*”, minoritas yang berbeda (dia menaksir kurang dari 10%) di antara rezim-rezim yang didominasi militer. Pemimpin negara telah berusaha untuk meyakinkan pandangannya bahwa “ketidakberubahan” ini adalah abash dengan mengatakan bahwa suatu bentuk demokrasi khas Indonesia telah ada: Demokrasi Pancasila. Dengan menunjuk pada fakta bahwa pemilihan secara berkala diselenggarakan, bahwa partai-partai oposisi mendapatkan perwakilan mereka di DPR pusat dan daerah, dan bahwa Suharto sendiri mendapatkan jabatannya melalui mekanisme pemilihan (tidak langsung).<sup>13</sup>

Pada kenyataannya, pemilihan umum dimanipulasikan dengan cermat, dan dengan kecanggihan suatu *thermostat*; Golkar (partai negara) memenangkan pemilihan

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, h. 341-343.

<sup>13</sup>Benedict R. O’G. Anderson, *Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia* (Yogyakarta; Mata Bangsa 2000), h. 247.

1971 dengan 62,8%, 62,1% pada tahun 1977, dan sekitar 64% pada tahun 1982. Partai-partai oposisi tidak hanya mendapati pemimpin mereka dimandulkan oleh Jenderal Ali Murtopo melalui organisasi Operasi Khusus, tapi juga duduk dalam dewan perwakilan yang pada prakteknya adalah mayoritas yang ditunjuk negara secara tetap. Tak ada seorang pun yang berani menantang Suharto dalam pemilihan presiden. Lebih lanjut, terdapat doktrin dwi dungsi, yang sekarang dipuja sebagai aspek fundamental dari Demokrasi Pancasila, yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki tanggung jawab tetap baik dalam keamanan nasional maupun pembangunan ekonomi sosial-politik. Di bawah panji-panji ini militer telah menyusup secara besar-besaran ke seluruh tataran aparat negara dan kebanyakan aspek kehidupan masyarakat. Akhirnya doktrin setengah resmi mengenai “massa mengambang” (semula diajukan pada tahun 1971) pada kenyatannya berbunyi bahwa massa pedesaan Indonesia yang lugu dalam mengemban tugas pembangunan tidaklah semestinya diganggu oleh partai-politik, kecuali pada masa kampanye singkat menjelang pemilihan umum yang ditetapkan negara. Menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pada tahun 1975, partai-partai politik secara resmi dilarang membentuk cabang di bawah level kabupaten “boleh dikatakan membatasi aktivitas mereka pada kota-kota besar”. Kesemua rumusan ideologis ini pada dasarnya melayani kepentingan negara dalam perannya sebagai negara.<sup>14</sup>

Orde Baru sangat lekat dengan keberadaan militer sebagai inti kekuatan Soeharto, tak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan militer sebagai penopang kekuatan pemerintahan Orde Baru membuat kekuasaan Soeharto dapat bertahan selama 32 tahun, sampai akhir 1998 masa berakhir periode kepemimpinannya. Tidak hanya militer, kekuatan Golongan Karya sebagai partai negara dianggap sebagai kekuatan yang membuat kekuasaan Soeharto berlapis dari pusat hingga daerah, pengendalian politik yang berada pada tahap yang dianggap membangkitkan negara dan mampu mengendalikan masyarakat dijamannya.

Dalam pandangan Daniel Dakidae, salah satu perlengkapan fasisme yang pertama adalah partai, yang dilengkapi dengan suatu jenis ideologi tertentu seperti Golongan Karya, Golkar.<sup>15</sup> Namun, mistifikasi Golongan Karya tentang dirinya hanya

---

<sup>14</sup>Ibid., h. 248-249

<sup>15</sup>Daniel Dhakidae, *Op.Cit.*, h. 258.

untuk mengatakan bahwa negara republik Indonesia tidak lain daripada suatu negara karya yang tidak jauh berbeda dari negara karya Spanyol tahun 1933. Seperti sudah dikatakan di depan kelahiran TNI yang dalam prosesnya pada dasarnya baru pada tahun 1947 namun secara ideologis didekatkan sedekat-dekatnya dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tidak lain dari usaha mengidentifikasi institusi militer tersebut dengan negara Indonesia sendiri. Apa yang berlaku pada militer ini seperti kita lihat dilakukan lagi oleh Golkar dengan mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan negara republik Indonesia, sedemikian dekatnya sehingga *Golongan Karya lahir sudah sejak 17 Agustus 1945*.

Dengan proses identifikasi semacam ini maka dengan kemenangan yang dicapai pada pemilihan umum 1971 dengan seluruh kekerasan negara untuk mencapai kemenangan tersebut, teror politik terhadap pemimpin politik, pembekuan partai-partai seperti PNI pelarangan dan terhadap didirikannya Masjumi yang disponsori Hatta, dan teror terhadap partai-partai lainnya, mewajibkan pegawai negeri memilih Golkar dengan risiko akan dipecat dari pekerjaannya. Golkar semakin menjadi partai Orde Baru.<sup>16</sup> Terror tersebut merupakan alat fasisme negara dalam mendisiplinkan tubuh politik sampai dengan sikap dan pikiran yang berada dalam kontrol negara yang merata untuk kepentingan dan simulasi bernegara. Hal tersebut adalah cara yang efektif untuk melihat sampai sejauh mana publik atau rakyat menjatuhkan pilihan politik, pilihan kebudayaan tiap saatnya terhadap negara dan lingkungan negara.

### **Pendisiplinan Tubuh Politik**

Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan pertama kali pada tahun 1955 di jaman Presiden Soekarno yang diikuti oleh 172 partai politik dengan jumlah pemilih sekitar 43 juta orang. Perolehan suara didominasi oleh empat partai besar yakni ; Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), Nahdlatul Ulama, Partai Komunis Indonesia.

Kompetisi dalam pembentukan jejaring partai dan organisasi hingga tingkat desa serta konflik ideologis mengenai dasar negara yang menjadi isu utama dalam kampanye masing-masing kekuatan politik untuk memperoleh dukungan massa, namun hasil

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 260-261.

pemilu 1955 telah memberikan legitimasi bagi beberapa partai politik yang ikut menjadi peserta dalam pemilu 1955. Dalam pemilu I untuk memilih dan memperebutkan 260 kursi anggota DPR dilaksanakan tanggal 29 September 1955, sedangkan pemilu II untuk memilih dan memperebutkan 520 kursi di konstituante dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955 (Sitompul, 1976:107 dalam Syarifuddin Jurdi, 2015:134). Hasil dari pemilu tahun 1955 untuk pemilihan anggota DPR, keluar 4 besar partai politik yang memperoleh suara sebagai berikut :

1. PNI memperoleh 57 kursi
2. Masyumi memperoleh 57 kursi
3. NU memperoleh 45 kursi
4. PKI memperoleh 39 kursi

Keempat partai besar diatas juga menjadi lompatan besar dalam sejarah perpolitikan dan kepartaian yang ada di Indonesia mulai dari PNI yang dalam sejarahnya dibentuk oleh para pelajar seperti Soekarno sejak tahun 1927 dan kemudian menjadi partai yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda karena dianggap memberikan ruh perjuangan dan pergerakan revolusi kemerdekaan agar Indonesia merdeka, perjalanan sejarahnya mendapatkan kekuatan politik kerakyatan bahwa kemerdekaan harus direbut dan PNI berhasil membuat peta perlawanan kepada pemerintah Hindia Belanda sampai Soekarno ditangkap di Yogyakarta pada tahun 1929 beserta tokoh PNI yang lain dan diadili dipengadilan Hindia Belanda sampai dimasukkan dalam penjara Sukamiskin Bandung sampai tahun 1930.

Berbeda dengan partai Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang juga merupakan partai politik Islam terbesar di tahun 1950an dan kemudian menjadi bayang-bayang PNI lantaran memperoleh kursi yang sama dengan PNI yaitu sebanyak 57 kursi. Perolehan suara dan kursi yang sama dengan PNI sehingga menjadi kelompok yang sama kuat, dari partai politik islam yang diwakili oleh Masyumi dan partai politik nasionalis yang diwakili oleh PNI. Namun dalam perjalanannya Masyumi yang berdiri pada tahun 1943, dan pada pemilu tahun 1955 partai Masyumi mendapat dukungan dan simpati yang mengalir dari masyarakat pada saat itu bahkan melebihi perolehan kursi partai NU yang memperoleh 45 kursi suara dukungan terbesar utamanya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Aceh.

Awalnya Masyumi didirikan adalah dasar untuk menaungi organ islam besar seperti NU, Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam). Masyumi baru menjadi partai setelah Indonesia merdeka yaitu tahun 1945 di Yogyakarta. Berbagai ketegangan dan konflik ideologi pada tahun 1952 mengakibatkan NU keluar dari Masyumi. Sampai pada puncak ketegangan dan konflik Masyumi dibubarkan pada tahun 1958 lantaran sejumlah petinggi Masyumi dianggap turut dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Tidak lama setelah itu presiden Soekarno akhirnya menerbitkan peringatan dan larangan aktivitas sejumlah partai politik dan organisasi untuk terlibat di beberapa daerah termasuk Masyumi. Hal tersebut jugalah sehingga presiden Soekarno mengeluarkan keputusan presiden tentang kebijakan anti multi partai lantaran dianggap akan membingungkan rakyat. Dengan dasar kebijakan anti multipartai tersebut yang dikeluarkan melalui keputusan presiden sehingga Masyumi juga ikut kena dampak pembubaran.

Lain halnya dengan Partai Komunis Indonesia yang juga bagian dari 4 partai besar dan menduduki peringkat 4 perolehan kursi sebanyak 39 kursi di parlemen. PKI lantaran identic dengan pemberontakan yang pertama pada tahun 1948 yang dikenal dengan pemberontakan Madiun yang efeknya adu domba terhadap TNI, dan juga pemberontakan kedua pada tahun 1965 yang terjadi pada kota Jakarta dan Yogyakarta yang mengakibatkan diculiknya 10 Jenderal perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut sampai pada Maret tahun 1966 PKI dinyatakan dibubarkan dan dianggap Partai Terlarang diseluruh wilayah Indonesia. Terjadi dalam pemerintahan Presiden Soekarno segala bentuk pemberontakan yang menginginkan Negara Indonesia berdasarkan dasar negara yang diinginkan oleh PKI yaitu Komunis, Islam yang diinginkan oleh DI TII dan PRRI yang menuntut pemerintahan sementara sampai ketegangan kembali stabil.

Namun di balik itu semua, Bung Karno sebetulnya berhati baik. Bung Karno sangat mencintai rakyatnya. Ia tidak pernah kejam terhadap musuh politiknya walaupun mereka ia jebloskan ke penjara, seperti para pemimpin Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang bergabung dengan gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Ketika Bung Karno harus berhadapan dengan

rakyatnya pada tahun 1965-1966, termasuk mahasiswa dan siswa sekolah menengah umum, ia memilih mundur daripada mengambil risiko pertumpahan darah atau perang saudara.<sup>17</sup>

Salah satu dasar paling kuat dalam diskursus politik melawan kolonialisme adalah Marxisme. Karena itu Soekarno, Hatta dan kawan-kawan secara terbuka mengaku “kiri” dan “Marxis”. Soekarno bergerak sejauh itu untuk mengatakan bahwa dia memelopori “Marhaenisme” yang tidak lain dari “Marxisme” yang diadaptasikan dan diterapkan di Indonesia. Namun, sebentar saja setelah kemerdekaan “kiri” menjadi problematic ketika ke dalam “kiri” masuk beberapa tokoh besar seperti Amir Sjarifuddin dengan titik kulminasi “Peristiwa Madiun”. Peristiwa ini hamper-hampir dengan sendirinya menyapu bersih kategori sebelum perang ketika kaum “kiri” seperti Soekarno, Hatta, bergeser ke “kanan”. Soekarno yang masa Perang Dingin berada lagi di “kiri” dengan seluruh keberpihakannya kepada Uni Soviet, Republik Rakyat China, dan merangkul bangsa-bangsa terjajah Afro-Asia dan Amerika Latin dengan gema semboyan kiri-revolusioner.<sup>18</sup> Sampai hari ini pun bekas pecahan Uni Soviet pun yaitu Rusia tetap berada pada jalur rangkulan sampai ke putri Soekarno yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri yang kemarin pada tanggal 02 Juni 2021 menerima Bintang Jasa Negara untuk Persahabatan (State Order of Friendship) dari Republik Federasi Rusia.

Tahun 1965 mengubah seluruh paham tentang kiri karena kiri pada waktu itu identic dengan “penghianatan” dan bukan semata-mata dengan Marxisme. Jauh lebih tepat apa yang yang disebut “kiri” adalah suatu *apostasia*, suatu gerak “bidah”, penyelewengan dari garis-garis utama, garis yang menjadi ukuran dan sekaligus penentu yang baik dan buruk. Dalam sekali pandang maka “kiri” langsung bertentangan dengan “kanan”, Marxisme langsung bertentangan dengan “Pancasila”, baik sebagai ideologi maupun sebagai suatu urutan waktu dengan suatu koinsidensi yang tepat ; 30 September dikutuk sebagai tanggal penghianatan dan 1 Oktober dirayakan sebagai tanggal “keramat” karena justru pada hari itulah Indonesia “diselamatkan oleh Pancasila” dan karena hari 1 Oktober adalah “hari sakti” dalam perumusan resmu disebut sebagai hari “Kesaktian Pancasila”. Setelah itu maka “kiri” hampir-hampir hilang dari kosakata

---

<sup>17</sup>Jusuf Wanandi, *Menyibak Tabir Orde Baru ; Memoar Politik Indonesia 1965-1998* (Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2018), h. 17.

<sup>18</sup>Daniel Dhakidae, *Op.Cit.* h. 691.

politik Indonesia. Kalau pun “kiri” masuk ke dalam politik Indonesia maka “kiri” lebih berarti *caveat* daripada suatu pengakuan keberadaannya. Semuanya dilanjutkan dengan suatu pertandingan wacana, *discourse competition*, untuk memenangkan medan pertempuran diskursus politik.<sup>19</sup>

Diskursus politik sampai hari ini menjadi tinjauan yang berlebihan terlebih jaman sekarang adalah jaman dimana teknologi sangat mendukung literasi politik digital. Hanya saja, isu diskursus politik memperlihatkan ketegangan yang dari dulu mempertentangkan kelompok nasionalis dan kelompok agamais sebagai diskursus yang selalu bersebelahan paham. Kelompok nasionalis dituduh atau bahkan dihubungkan dengan komunisme sedang kelompok agamais dituduh atau kerap dihubungkan sebagai kelompok radikal yang akan melakukan tindakan terorisme bahkan sampai aktivitas pemberontakan. Padahal baik kelompok kiri maupun kelompok kanan pernah punya sejarah pemberontakan masing-masing terhadap negara.

Paradoks terjadi di sini yaitu ketika dilarang maka pelarangan itu sendiri menjadi pintu bagi masuknya diskursus kiri. Pelarangan itu justru menjadi pintu masuk pertandingan diskursus yang dikerjakan dengan sangat teliti.<sup>20</sup> Diskursus pemakaian kata “kiri” maupun “kanan” merupakan pembingkai fikiran dan sekaligus memberi tanda terhadap kelompok yang radikal di kelompoknya masing masing, perlu ada satu tafsir terhadap Pancasila yang memungkinkan untuk tidak ditafsirkan dengan hebat dari ideologi kiri sampai ideologi kanan sehingga Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia.

Meskipun sistem multipartai merupakan sesuatu yang jamak (natural) di dalam masyarakat Indonesia, sistem kepartaian yang memperoleh dukungan riil dari para pemilih pada dasarnya lebih mengarah kepada sistem yang bercorak multipartai moderat. Kalau dilihat dari segi jumlah. Argument demikian didasari oleh fakta hasil empat kali pemilu secara demokratis yang pernah dilakukan, yaitu pemilu 1955, 1999, 2004 dan 2009. Empat kali pemilu ini menghasilkan partai partai yang memperoleh dukungan cukup berarti pada kisaran empat sampai sembilan partai saja. Partai-partai lainnya hanya memperoleh dukungan sangat kecil.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang dianggap paling demokratis di dalam sejarah politik di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari dianutnya kebijakan sistem multipartai, pemilu 1955 diikuti oleh 172 partai, organisasi dan perorangan. Walaupun menjadi pemilu yang dianggap demokratis namun ditahun tersebut merupakan zaman yang begitu sarat akan ketegangan dan konflik.

Peningkatan suhu politik disertai pula oleh pertentangan ideologis yang telah mewarnai proses pembentukan Indonesia modern, tidak dapat dilepaskan dari pertentangan ideologi yang terjadi pra kemerdekaan, itulah yang terjadi pada masa kampanye 1955, setidaknya menurut berbagai sumber yang paling penting adalah pertentangan antara kalangan Islam dengan kalangan nasionalis kebangsaan yang diwakili oleh kelompok sosialis, nasionalis dan komunis mengenai dasar negara.<sup>21</sup> Pertentangan ideologi oleh kelompok ini tidak pernah selesai sampai post Soeharto sekalipun di jaman orde milenial sekarang, malah semakin memperumit ketegangan antara kelompok nasionalis dan kelompok islamis walau kelompok komunis telah runtuh namun diksi diksi komunis tetap digunakan oleh beberapa kelompok kepentingan untuk tetap membuat gaduh, menyerang lawan politik dan menganggap komunisme akan bangkit, dan dianggap mesin politiknya masih berjalan dan tidak segan-segan kelompok ini menggunakan diksi-diksi komunisme pada ruang publik bahkan sampai pada panggung-panggung agama.

## Penutup

Tubuh politik dipandang bukan sebagai sarana bagi reproduksi, melainkan sebagai objek untuk dimanipulasi. Objek kuasa pelan-pelan terbentuk dalam tempat-tempat yang tersebar dan periferi, ini lah yang disebut sebagai “kuasa disiplin”, atau detail dari *Discipline and Punish*. Tujuan dasar kuasa disiplin ini adalah untuk memproduksi manusia/individu yang dapat diperlakukan sebagai tubuh, organ, partai sampai negara yang patuh. Tubuh yang patuh ini juga harus menjadi tubuh yang produktif. Teknologi disiplin berkembang dan menjadi sempurna dalam bengkel-bengkel kerja, tangsi-tangsi tentara, penjara-penjara, rumah sakit. Di dalam masing-

---

<sup>21</sup>Syarifuddin Jurdi, *Op.Cit.*, h.134.

masing tempat itu terdapat tujuan umum yang sama, yakni perkembangan parallel dalam kegunaan dan kepatuhan individu dan masyarakat.<sup>22</sup>

Seteru ideologi terhadap kelompok yang bertikai dalam negara selama proses sistem politik berlangsung merupakan pendisiplinan yang diterapkan pada objek seperti ormas, partai dan lembaga sampai negara sebagai objek yang dimanipulasi untuk menjelaskan hubungan-hubungan kuasa, pengetahuan dan tubuh dalam masyarakat negara yang bekerja sebagai simulasi kontrol.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict R. O’G. *Kuasa-Kata; Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia*. Yogyakarta; Mata Bangsa, 2000.
- Bungin, Burhan. *Komunikasi Politik Pencitraan*. Jakarta; PrenadaMedia Grup, 2018.
- Dhakidae, Daniel. *Cendekiawan dan Kekuasaan: Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaa Utama. 2003.
- Foucault, Michel. *Disiplin Tubuh: Bengkel Individu Modern*. Yogyakarta: LKIS, 1997.
- Haryatmoko. “Kekuasaan Melahirkan Anti Kekuasaan; Menelanjangi Mekanisme dan Teknik Kekuasaan Bersama Foucoult” dalam *Jurnal Basis*, Nomor 01-02, Tahun ke 51 (2002 ).
- Jurdi, Syarifuddin. *Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia Kontestasi Ideologi dan Kepentingan*. Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Politik UIN ALauddin Makassar, 2015.
- Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2015.
- Philpott, Simon. *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Wanandi, Jusuf. *Menyibak Tabir Orde Baru: Memoar Politik Indonesia 1965-1998*. Jakarta; PT. Kompas Media Nusantara, 2018.

---

<sup>22</sup>Michel Foucault, *Disiplin Tubuh ; Bengkel Individu Modern* (Yogyakarta: LKIS, 1997), h. 22.